

SURAT KETERANGAN

No: 02/LoA/IJIHC/7/2025

Indonesian Journal of Islamic History and Culture adalah jurnal penelitian ilmiah terakreditasi Sinta 4 di bawah Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan ini, Editor in chief Indonesian Journal of Islamic History and Culture menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Husna¹; Munawiah Abdullah¹; Putra Hidayatullah¹
Afiliasi : ¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Judul : *The Life of Inong Balee After Conflict in Bireuen Regency / Kehidupan Inong Balee Pasca Konflik di Kabupaten Bireuen*
ID Submit : 20983

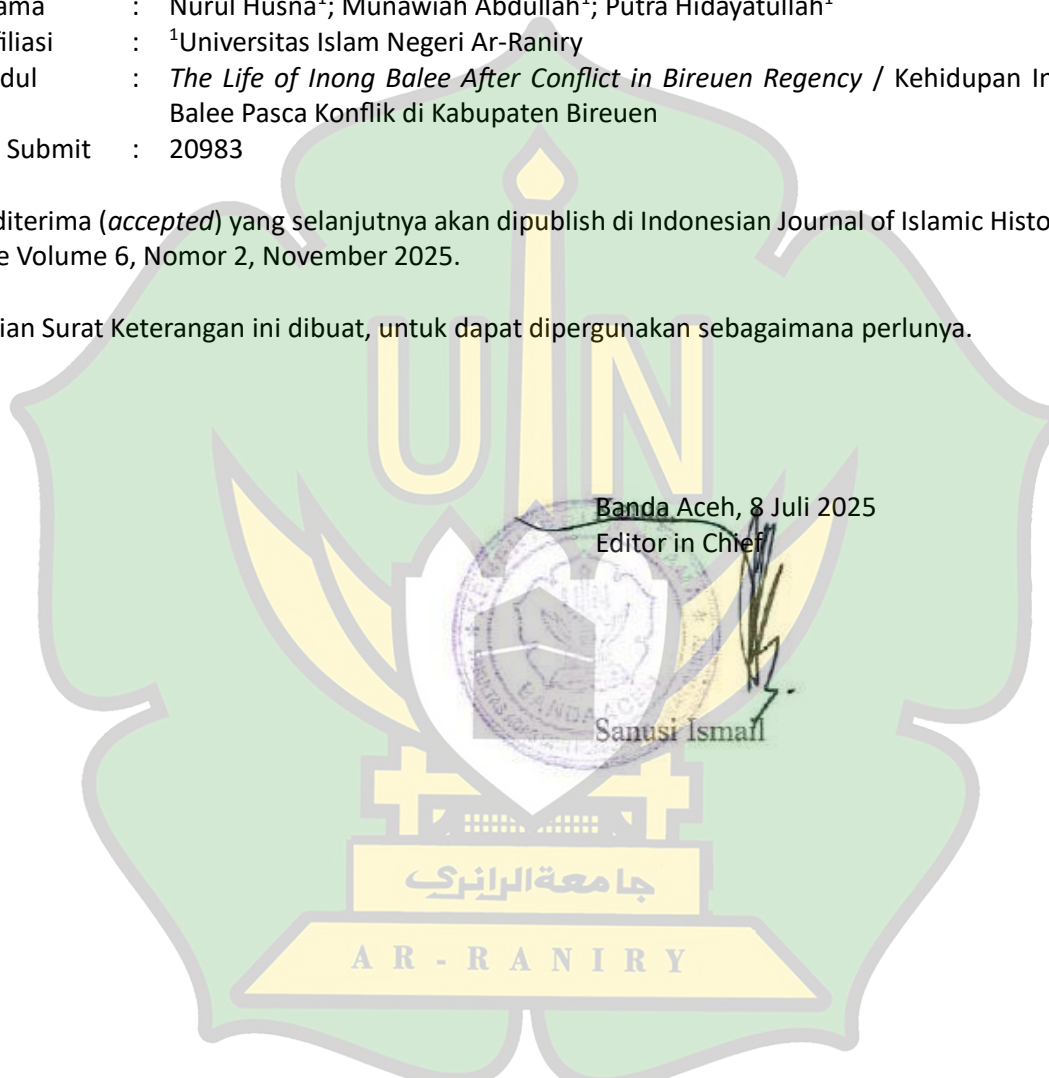
Telah diterima (*accepted*) yang selanjutnya akan dipublish di Indonesian Journal of Islamic History and Culture Volume 6, Nomor 2, November 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 8 Juli 2025

Editor in Chief

Sanusi Ismail



The Life Of *Inong Balee* After Conflict In Bireuen Regency

Nurul Husna¹, Munawiah Abdullah², Putra Hidayatullah³ Ajidar Matsyah⁴, Hamdina Wahyuni⁵

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

210501045@student.ar-raniry.ac.id¹ munawiah@ar-raniry.ac.id² putra.hidayatullah@ar-raniry.ac.id³
ajidar.matsyah@ar-raniry.ac.id⁴ hamdina.wahyuni@ar-raniry.ac.id⁵

Abstract

The conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian Government has had a major impact on Acehnese society, including women in the Inong Balee troops. During the conflict, they played a role in logistics, military operations, and political education. After the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding, they faced challenges in the process of reintegration into civil society. This study analyzes the socio-economic dynamics and barriers to reintegration faced by former Inong Balee in Bireuen Regency. The method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach through interviews and documentation. The results show a shift in roles from fighters to domestic economic actors, such as farmers, traders, and micro business managers. The obstacles that emerged include limited capital, lack of skills, social stigma, and psychological pressure. Family discipline and responsibility are internal strengths in adaptation, although they are not yet supported structurally. These findings emphasize the importance of contextual, gender-responsive, and sustainable reintegration policies to protect and empower female ex-combatants.

Keywords: *Inong Balee, post-conflict, Bireuen, Aceh.*

Abstrak

Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia berdampak besar terhadap masyarakat Aceh, termasuk perempuan dalam pasukan *Inong Balee*. Selama konflik, mereka berperan dalam logistik, operasi militer, dan pendidikan politik. Pasca Nota Kesepahaman Helsinki 2005, mereka menghadapi tantangan dalam proses reintegrasi ke masyarakat sipil. Kajian ini menganalisis dinamika sosial ekonomi dan hambatan reintegrasi yang dihadapi mantan *Inong Balee* di Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan pergeseran peran dari pejuang menjadi pelaku ekonomi domestik, seperti petani, pedagang, dan pengelola usaha mikro. Hambatan yang muncul mencakup keterbatasan modal, minimnya keterampilan, stigma sosial, serta tekanan psikologis. Disiplin dan tanggung jawab keluarga menjadi kekuatan internal dalam adaptasi, meski belum didukung secara struktural. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan reintegrasi yang kontekstual, responsif gender, dan berkelanjutan untuk melindungi serta memberdayakan perempuan eks kombatan.

Kata Kunci: *Inong Balee, pasca konflik, Bireuen, Aceh.*

Pendahuluan

Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia memiliki akar sejarah yang cukup Panjang, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat Aceh. Deklarasi kemerdekaan Aceh oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 di Pidie menjadi awal perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, konflik bersenjata berlangsung selama puluhan tahun, meninggalkan dampak yang sangat kompleks bagi masyarakat Aceh, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia (Jayanti, 2018).

Salah satu akibat langsung dari konflik ini adalah meningkatnya angka kemiskinan, terbatasnya akses Pendidikan, dan trauma kolektif yang berkepanjangan. Masyarakat hidup dalam ketidakpastian dan tekanan, sementara ruang-ruang sipil dan kehidupan sehari-hari sering kali terdistorsi oleh situasi situasi perang. Setelah tercapainya perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005, konflik secara resmi dinyatakan berakhir dan Aceh diberikan otonomi khusus. Namun, transisi menuju perdamaian tidak serta-merta menghapus dampak panjang konflik, terutama bagi individu yang terlibat langsung dalam perjuangan senjata (Susanti, 2016). *Inong Balee* termasuk kelompok yang terdampak secara langsung, yaitu pasukan perempuan dalam struktur militer GAM yang dibentuk sebagai bagian dari strategi perlawanan. Istilah ini diberikan oleh Panglima GAM, Tengku Abdullah Syafe'i sebagai bentuk penghormatan terhadap keberanian perempuan Aceh, dengan merujuk pada warisan sejarah Laksamana Malahayati yang memimpin pasukan janda dalam melawan kolonial pada abad ke-16 (Mutiah Nabilla Ulfah, Muhammad Fedryansyah, 2022). Selama masa konflik *Inong Balee* tidak hanya berperan sebagai pendukung logistik, tetapi juga terlibat langsung dalam operasi militer, Pendidikan politik, serta penguatan ideologi perjuangan melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat dan pasantren (Masrizal et al., 2020).

Jumlah pasti anggota *Inong Balee* memang tidak terdokumentasi secara resmi, namun diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. Peran mereka dalam konflik mencerminkan keberanian dalam semangat juang yang setara dengan kombatan laki-laki. Namun demikian, kehidupan mereka berubah secara drastis. Hilangnya status sebagai pejuang keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan layanan dasar, serta adanya stigma sosial menjadi tantangan besar dalam proses reintegrasi ke masyarakat sipil (Rasyidah, 2019).

Inong Balee juga menghadapi dampak psikologis akibat pengalaman kekerasan selama masa konflik, selain tantangan ekonomi dan sosial. Trauma, kehilangan, serta gangguan psikologis menjadi bagian dari beban yang harus mereka tanggung, sementara akses terhadap layanan Kesehatan mental masih sangat terbatas (Nurzahra et al., 2021). Kekuatan komunitas lokal dan solidaritas sosial menjadi sumber dukungan penting dalam membantu proses pemulihan. Beberapa dari mereka bahkan berhasil bangkit dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di masa damai (Rizal, 2022).

Berdasarkan paparan tersebut, jelas bahwa kehidupan *Inong Balee* pasca konflik tidak hanya menyangkut persoalan identitas dan peran sosial, tetapi juga menyentuh dinamika ekonomi dan strategi adaptasi dalam konteks perdamaian. Kajian ini difokuskan untuk memahami bagaimana perubahan peran, interaksi sosial, serta tantangan dan strategi reintegrasi yang dihadapi oleh para *Inong Balee*. Dengan tema "Kehidupan *Inong Balee* Pasca Konflik di Kabupaten Bireuen" sebagai kontribusi dalam memahami peran dan posisi perempuan eks kombatan dalam konteks pasca konflik dan pembangunan perdamaian di Aceh.

Metode

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami secara mendalam pengalaman hidup *Inong Balee* pasca konflik.

Pendekatan fenomenologis dipilih karena mampu menggali makna-makna subjektif yang dialami langsung oleh mantan anggota *Inong Balee* dalam menghadapi dinamika kehidupan setelah berakhirnya konflik (Fiantika & Maharani, 2022). Kajian dilaksanakan di Kabupaten Bireuen, lokasi ini dipilih karena merupakan basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan memiliki keterlibatan signifikan perempuan dalam pasukan *Inong Balee*. Jenis kajian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dengan tujuan menggambarkan sekaligus menganalisis keterkaitan antara pengalaman sosial, psikologis, dan ekonomi para mantan *Inong Balee* dengan struktur sosial yang berkembang setelah konflik. Subjek kajian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus kajian, seperti keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata dan pengalaman hidup pasca konflik. Untuk memperluas cakupan dan kedalaman data, digunakan pula teknik snowball sampling, di mana informan awal merekomendasikan calon informan lainnya yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan (Sugiyono, 2020). Ada tujuh orang informan yang diwawancarai.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati situasi sosial dan aktivitas *Inong Balee* dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi informan dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Sedangkan dokumentasi meliputi foto, video, dan rekaman audio yang digunakan untuk memperkuat keabsahan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur dan alat perekam suara sebagai instrument bantu.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: (1) reduksi data; dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan informasi penting terkait peran serta strategi bertahan hidup *Inong Balee*, (2) penyajian data; menyusun informasi ke dalam pola yang

sistematis agar dapat dipahami secara utuh, dan (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan; yang dilakukan melalui peninjauan ulang data serta triangulasi untuk memastikan keabsahan temuan (Dwiyanto, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Perubahan Identitas Sosial

Pasca konflik bersenjata di Aceh, perubahan besar terjadi dalam kehidupan para mantan anggota *Inong Balee*. Salah satu transformasi paling kentara adalah pada identitas sosial mereka. Sebelumnya dikenal sebagai bagian dari kelompok kombatan perempuan yang berperan dalam struktur militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kini mereka dihadapkan pada realitas damai yang menuntut penyesuaian dan adaptasi dalam konteks sipil.

Proses integrasi ke dalam masyarakat tidak berlangsung secara otomatis dan mulus. Meskipun pada tataran diskursus mereka kerap disebut sebagai simbol ketangguhan perempuan dalam konflik, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses penyesuaian diri berjalan dengan kompleks, penuh tantangan, dan seringkali dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Banyak dari mereka yang memilih Kembali ke ranah domestik bukan semata karena dorongan pilihan, tetapi lebih karena keterbatasan ruang yang tersedia bagi mereka di ruang publik. Tidak sedikit pula yang merasa kehilangan arah setelah struktur dan solidaritas militer yang pernah memberikan makna hidup tiba-tiba hilang begitu saja setelah damai.

"Dulu kami dilatih untuk berperang, memegang senjata, sekarang saya memegang cangkul. Kami belajar untuk bertahan hidup secara damai. Tidak ada gaji, tidak ada jabatan, tapi saya tetap kerja, saya ke sawah, ke ladang, demi anak-anak bisa sekolah. Hidup memang berubah, tapi semangat tetap harus sama, berjuang harus lebih keras walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi dalam partai kami tetap ikut, kami tidak akan mundur demi perjuangan". (Wawancara dengan Maryamah, 17 Mei 2025)

Transisi dari memegang senjata ke menggenggam cangkul bukanlah proses yang sederhana. Kalimat ini mencerminkan perjuangan keras para perempuan eks kombatan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil. Namun, di balik upaya tersebut tersembunyi kenyataan pahit bahwa tidak terdapat penghargaan resmi dari negara, tidak ada pengakuan yang terstruktur, serta belum tersedia sistem reintegrasi yang benar-benar mampu menjamin keberlangsungan hidup mereka. Menjalani aktivitas seperti bertani dan kembali ke peran domestik menjadi bentuk adaptasi dalam konteks reintegrasi yang berjalan secara terbatas, di mana mereka harus menyesuaikan diri dengan norma sosial yang dominan, sambil menghadapi pandangan masyarakat yang ambigu antara rasa hormat atas perjuangan mereka dan kecurigaan terhadap masa lalu sebagai kombatan.

Pilihan perempuan eks kombatan untuk terjun ke sektor pertanian menunjukkan kesinambungan semangat pengabdian dan ketangguhan yang sebelumnya diwujudkan dalam bentuk perjuangan bersenjata. Saat ini, semangat itu dialihkan untuk mendukung ketahanan ekonomi keluarga dan memperkuat peran dalam ruang domestik. Perubahan ini mencerminkan transisi mendalam dari keterlibatan kolektif dalam militer ke peran-peran sipil yang lebih bersifat individual, seperti menjadi ibu dan anggota masyarakat yang memikul tanggung jawab emosional dan ekonomi. Transformasi ini sekaligus menegaskan bahwa keterlibatan perempuan tidak berhenti ketika konflik berakhir, tetapi justru berkembang menjadi peran yang lebih kompleks dan berlapis dalam konteks kehidupan sipil pasca konflik.

Teori peran Ralph Linton menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk pergeseran antara ascribed roles (peran yang diperoleh sejak lahir) dan achieved roles (peran yang diperoleh melalui pengalaman dan usaha). Peran sebagai kombatan yang dahulu diperoleh melalui pelatihan dan keerlibatan aktif dalam perjuangan kini ditinggalkan, digantikan oleh peran yang

diasosiasikan secara normative dengan perempuan dalam masyarakat, yaitu sebagai ibu, istri, dan pengelola rumah tangga. Sementara menurut Bruce J. Biddle, perubahan ini juga mencerminkan dinamika harapan sosial yang berubah terhadap individu yang mengalami transisi peran. Dari perempuan yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata, masyarakat kini berharap mereka kembali pada peran normal sebagaimana perempuan lain, sebuah harapan yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak dan pilihan hidup mereka (Biddle, 1986).

"Sekarang kami Sebagian aktif di masyarakat, terutama untuk kegiatan sosial seperti membantu anak yatim dan janda syuhada. Saat hari meugang tiba, kami kumpulkan sumbangan dan membuat acara santunan. Dulu kami berjuang dengan senjata, sekarang kami berjuang dengan cara membantu masyarakat." (Wawancara dengan Muslimah, 20 Mei 2025)

Peran domestik bukan satu-satunya wujud kontribusi mantan *Inong Balee*, karena transformasi sosial mereka juga terlihat dalam keaktifan di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, seperti mengorganisasi santunan bagi anak yatim dan janda korban konflik, serta membantu masyarakat dalam momen-momen penting seperti perayaan meugang. Sebagian juga mulai mengambil peran dalam struktur kelembagaan desa, termasuk dalam organisasi perempuan seperti PKK dan lembaga adat.

Pengalaman mereka selama berada dalam struktur militer ternyata membentuk kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang kemudian mereka terapkan dalam kehidupan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam konteks perjuangan tidak berhenti di medan tempur, tetapi terus berlanjut dalam bentuk-bentuk pengabdian yang lebih terarah pada proses pemulihan sosial. Proses transisi dari militer ke sipil tersebut berlangsung secara alami dan mencerminkan keberlanjutan peran strategis perempuan eks kombatan dalam pembangunan masyarakat pasca konflik.

Peran strategis yang terabaikan dalam damai

Selama masa konflik bersenjata di Aceh, keberadaan pasukan *Inong Balee* menjadi bagian integral dalam struktur militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai aktor utama yang menjalankan berbagai fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan perjuangan. Peran mereka mencakup logistik, intelijen, hingga keterlibatan langsung dalam pelatihan militer dan operasi lapangan. Peran strategis ini tercermin dalam berbagai tindakan yang dilakukan secara terorganisir dan penuh risiko, seperti pengiriman logistik melalui jalur rahasia dengan menggunakan kode-kode tertentu. Salah satu informan mengenang situasi saat masa konflik dengan mengatakan “nyak nyoe hana leumo beuh, kajeut katron laju”, yang bermakna bahwa saat itu tidak ada aparat keamanan yang mengawasi di sekitar lokasi, sehingga para anggota bisa turun dari gunung untuk mengambil makanan yang dikirim oleh masyarakat. Keberadaan mereka menjadi komponen penting dalam menopang keberlangsungan perjuangan bersenjata di wilayah-wilayah pegunungan dan pedalaman Aceh.

Pembentukan pasukan ini merupakan kelanjutan dari struktur militer GAM yang terinspirasi oleh sejarah perlawanan Laksamana Malahayati, seorang tokoh perempuan yang mewakili simbol keberanian dan kepemimpinan dalam sejarah Aceh. Semangat keterlibatan mereka lahir dari kesadaran atas ketidakadilan dan pengalaman kekerasan yang dialami oleh perempuan selama konflik, serta dorongan untuk memperjuangkan hak dan martabat kolektif masyarakat Aceh.

“Kami ikut dalam Gerakan ini karena sudah tidak sanggup lagi melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aceh saat itu. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, bagaimana perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi bahkan sampai

pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat, itu meninggalkan luka mendalam. Kami memilih untuk berjuang, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga demi kehormatan dan keselamatan rakyat Aceh.” (Wawancara dengan Ajirna, 23 Mei 2025)

Namun, hal tersebut berubah drastis ketika konflik berakhir melalui perjanjian damai. Dalam masa transisi ke perdamaian dan pembangunan ulang Aceh, peran historis dan kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh *Inong Balee* justru tidak mendapatkan pengakuan yang setara. Proses reintegrasi yang disusun oleh negara maupun lembaga internasional banyak berfokus pada eks kombatan laki-laki, sementara perempuan eks kombatan tidak mendapatkan posisi strategis dalam perumusan kebijakan maupun dalam akses terhadap bantuan ekonomi dan sosial.

Sebagian besar dari mereka kembali ke kampung halaman dengan status sosial yang tidak lagi dilihat sebagai pejuang, melainkan hanya sebagai “perempuan eks kombatan” sebuah identitas yang bahkan menimbulkan stigma dalam lingkungan sosialnya. Minimnya representasi mereka dalam struktur pemerintahan lokal atau lembaga eks kombatan memperkuat posisi mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam narasi pasca konflik.

Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk marginalisasi gender dalam konteks pasca konflik. Perspektif *Feminist Peace Theory* menyoroti bahwa perdamaian sering dibangun dalam kerangka maskulin, yang mengukur keberhasilan hanya dari berakhirnya kekerasan bersenjata, tanpa memperhatikan keadilan gender atau pengakuan terhadap kontribusi perempuan (Rolls & Evans, 2020). Dalam hal ini, pengalaman dan kebutuhan spesifik *Inong Balee* tidak sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan pasca konflik, mencerminkan kegagalan negara dan lembaga terkait dalam membongkar struktur patriarkal yang masih dominan di masa damai.

“Kami dulu ikut perang, tapi setelah damai, kami tidak pernah dilibatkan. Bahkan untuk program bantuan pun

terkadang nama kami ada yang tidak masuk dalam pendataan.” (Wawancara dengan Mutiani, 25 Mei 2025)

Pengalaman ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak selalu menghadirkan pemulihan yang adil bagi seluruh aktor konflik. Bagi perempuan eks kombatan, masa damai justru menjadi ruang baru yang menampilkan ketimpangan struktural, di mana mereka kembali berjuang, bukan dengan senjata, melainkan untuk memperoleh pengakuan, keadilan, dan keberlanjutan hidup. Tanpa pengakuan atas kontribusi mereka selama konflik, banyak dari mereka terpinggirkan dalam proses rekonstruksi. Maka, perdamaian sejati bukan hanya soal berakhirnya kekerasan, tetapi harus mencakup keadilan gender dan partisipasi yang setara.

Minimnya Keterlibatan *Inong Balee* dalam Struktur Pemerintahan

Rekonstruksi sosial pasca konflik dan penandatanganan MoU Helsinki membawa harapan besar terhadap keterlibatan mantan kombatan, baik laki-laki maupun perempuan, ke dalam struktur pemerintahan lokal sebagai bagian dari proses reintegrasi yang menyeluruh. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan mantan anggota *Inong Balee* dalam pemerintahan, baik pada tingkat desa maupun kabupaten, masih sangat terbatas.

Berdasarkan keterangan para informan, sebagian besar perempuan eks kombatan tidak menempati posisi strategis dalam struktur pemerintahan ataupun dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam periode pasca konflik, peran sosial mereka bergeser ke aktivitas ekonomi subsisten seperti bertani, berkebun, atau menjadi buruh harian. Transisi ini menunjukkan bahwa reintegrasi mereka berlangsung dalam ranah domestik dan informal, tanpa akses yang memadai ke lembaga formal negara. Minimnya keterlibatan mereka tidak hanya mencerminkan ketimpangan struktural, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kontribusi historis mereka selama konflik tidak

diterjemahkan ke dalam pengakuan politik pasca damai.

Kondisi ini dapat dianalisis melalui teori peran, yang dijelaskan oleh Talcott Parsons bahwa peran sosial perempuan dan laki-laki dalam masyarakat memiliki pembagian yang bersifat fungsional. Namun dalam konteks pasca konflik, peran sosial perempuan mengalami perubahan signifikan dari masa konflik ke masa damai. Pada masa konflik, mereka memainkan peran aktif sebagai pejuang, penyedia logistik, atau informan strategis. Pasca konflik, peran mereka justru mengalami reposisi ke peran tradisional, yakni sebagai ibu rumah tangga atau pencari nafkah informal. Pergeseran ini bukan semata-mata karena pilihan individu, tetapi lebih karena norma sosial yang patriarkal dan struktur budaya yang menghambat perempuan dari akses terhadap ruang-ruang formal kekuasaan (Wienclaw, 2021).

Minimnya keterlibatan ini mencerminkan masih kuatnya nilai-nilai patriarkal dalam struktur sosial pasca konflik, di mana keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sering kali dianggap tidak lazim atau bertentangan dengan norma budaya. Eksklusi ini semakin diperkuat oleh marginalisasi mereka dalam forum-forum musyawarah masyarakat serta dari lembaga-lembaga resmi di tingkat desa. Ironisnya, fakta sejarah menunjukkan bahwa *Inong Balee* berperan penting dalam perjuangan bersenjata dan dukungan logistik selama konflik, sehingga seharusnya mereka memiliki legitimasi sosial dan politik dalam proses pembangunan pasca konflik.

Minimnya representasi perempuan eks kombatan dalam struktur pemerintahan juga menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Ketidakhadiran mereka dalam peran formal pemerintahan memperkuat eksklusi sosial yang mereka alami dan berpotensi menghambat kontribusi aktif mereka dalam pembangunan komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi pasca konflik belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan keadilan

partisipatif bagi semua pihak yang terdampak konflik.

Meskipun terdapat beberapa individu yang berhasil mendapatkan posisi dalam institusi pemerintahan lokal biasanya dalam peran teknis atau administrative kasus-kasus tersebut bersifat pengecualian dan tidak mencerminkan kenyataan yang dihadapi mayoritas anggota *Inong Balee*. Umumnya, peran mereka hanya terbatas pada posisi honorer atau non-struktural, tanpa keterlibatan strategis dalam penyusunan kebijakan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya partisipasi ini adalah rendahnya tingkat pendidikan formal di kalangan perempuan eks kombatan. Banyak dari mereka hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak memiliki ijazah sama sekali. Persyaratan birokratis dan administratif dalam pemerintahan sering kali menyulitkan mereka untuk mengakses posisi formal, meskipun dari segi pengalaman selama konflik, kontribusi mereka sangat signifikan.

“Ada beberapa banyak dari kami yang tidak memiliki ijazah. Jadi, meskipun kami berpengalaman, kami sering kali tidak memenuhi syarat untuk posisi-posisi dalam pemerintahan.” (Wawancara dengan Mutiani, pada 25 Mei 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa reintegrasi pasca konflik belum menciptakan keadilan partisipatif. Ketika peran dan kontribusi perempuan eks kombatan diabaikan dalam sistem pemerintahan, maka proses pembangunan pasca konflik menjadi timpang dan tidak inklusif. Mendorong kebijakan afirmatif yang secara khusus memberikan ruang dan akses bagi perempuan eks kombatan untuk terlibat dalam pemerintahan lokal. Hal ini bukan hanya soal representasi, tetapi juga tentang pengakuan atas peran sejarah dan hak untuk membangun masa depan secara setara.

Ketimpangan Akses Bantuan antara Laki-laki dan Perempuan

Proses reintegrasi pasca konflik di Aceh secara normatif dirancang untuk mencakup

seluruh mantan kombatan tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam implementasinya terdapat bias struktural yang cukup kuat terhadap perempuan, khususnya mantan anggota Pasukan *Inong Balee*. Program bantuan ekonomi, pelatihan, dan akses kelembagaan secara formal terbuka bagi semua eks kombatan, dalam praktiknya mantan kombatan laki-laki lebih sering diprioritaskan sebagai penerima manfaat utama. Perempuan eks kombatan justru sering terpinggirkan dan tidak diposisikan sebagai kelompok prioritas. Situasi ini menciptakan kerentanan ganda, di mana mereka mengalami diskriminasi berlapis baik sebagai perempuan dalam tatanan masyarakat patriarkal, maupun sebagai eks kombatan yang kontribusinya selama konflik kerap diabaikan secara institusional.

Salah satu permasalahan utama dalam proses reintegrasi pasca konflik di Aceh adalah ketimpangan distribusi bantuan antara mantan kombatan laki-laki dan perempuan. Meskipun secara formal bantuan disalurkan melalui kelompok eks kombatan, dalam praktiknya akses terhadap bantuan lebih banyak didominasi oleh laki-laki yang memegang posisi kepemimpinan dalam struktur tersebut. Sementara itu, perempuan terutama mantan anggota *Inong Balee* menghadapi berbagai hambatan administratif dan sosial yang menyebabkan mereka terpinggirkan dari manfaat program.

Program-program yang secara formal mengklaim inklusivitas ternyata kerap gagal menjawab persoalan spesifik yang dihadapi oleh perempuan eks kombatan, seperti tidak adanya dokumen resmi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya stigma sosial yang melekat. Pada masyarakat yang masih sangat patriarkal seperti di Aceh, kebijakan yang bersifat netral gender justru berisiko mempertahankan ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama. Tanpa disertai upaya afirmatif yang nyata, pendekatan semacam ini cenderung memperkuat eksklusi terhadap kelompok yang secara historis telah terpinggirkan. Akibatnya, perempuan eks kombatan tidak hanya kehilangan akses

terhadap hak-hak ekonomi dan sosial, tetapi juga tidak mendapatkan pengakuan yang sepadan atas kontribusi mereka selama masa konflik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bu Zuraida yang menyoroti kompleksitas administratif dalam mengakses bantuan:

“Sekarang kalau tidak ada orang dalam, susah. Harus ada proposal, badan hukum, bahkan notaris, dan nilainya harus diatas lima puluh juta. Padahal kami ini hanya ingin bertahan hidup, bukan buka perusahaan besar. Bantuan bukan lagi soal hak, tapi soal siapa yang punya koneksi.” (Wawancara dengan Muslimah, 20 Mei 2025).

Persyaratan administratif yang kompleks dan memberatkan menjadi penghalang nyata bagi akses perempuan eks kombatan terhadap bantuan ekonomi pasca konflik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya keberpihakan sistem terhadap kelompok paling rentan, seperti *Inong Balee*, yang justru seharusnya menjadi prioritas dalam proses pemulihan. Alih-alih menjadi instrumen pemulihan yang inklusif, sistem reintegrasi justru menciptakan paradoks: bantuan yang dirancang untuk memulihkan kehidupan eks kombatan berubah menjadi fasilitas terbatas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki modal sosial, pendidikan, atau relasi kuasa. Dalam konteks perempuan eks kombatan, ketidakadilan ini semakin menegaskan adanya eksklusi struktural, di mana hak atas pemulihan ekonomi berubah menjadi kemewahan yang tidak semua pihak dapat jangkau.

Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya sensitif terhadap isu gender, tetapi juga bersifat transformatif dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan program bantuan pasca konflik. Dalam konteks sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal, pendekatan kebijakan yang tampak netral secara gender justru berisiko memperkuat ketimpangan yang telah lama mengakar. Netralitas kebijakan dalam situasi yang secara historis telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat akan gagal

menjawab kebutuhan nyata mereka, khususnya bagi perempuan eks kombatan seperti *Inong Balee*.

Oleh sebab itu, program pemulihan dan pemberdayaan pasca konflik harus mampu membaca kerentanan spesifik yang dialami oleh kelompok perempuan dan merancang intervensi yang bersifat afirmatif. Intervensi ini dapat berupa pendampingan administratif yang mempermudah akses terhadap bantuan, pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi lokal, serta perlindungan dari stigma sosial yang sering kali melekat pada identitas mereka sebagai mantan kombatan. Dengan pendekatan seperti ini, kebijakan pasca konflik tidak hanya bersifat reparatif tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang berkelanjutan dan setara bagi seluruh kelompok terdampak.

Ketimpangan Akses dan Dinamika Bantuan Ekonomi Pasca Konflik

Salah satu aspek krusial dalam proses reintegrasi pasca konflik di Aceh adalah pemulihan ekonomi bagi mantan kombatan dan kelompok masyarakat yang terdampak, termasuk perempuan eks kombatan yang tergabung dalam kelompok *Inong Balee*. Dalam sejumlah dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan reintegrasi, seperti Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) tahun 2005 serta program-program turunan dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA), memuat komitmen untuk memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi lainnya kepada para mantan kombatan dan kelompok rentan terdampak konflik.

Implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan akses, khususnya bagi perempuan eks kombatan seperti *Inong Balee*. Berbagai hambatan struktural dan kultural menyebabkan mereka tidak memperoleh akses yang setara terhadap program pemulihan ekonomi. Meskipun secara formal *Inong Balee* tercantum sebagai bagian dari kelompok penerima manfaat program reintegrasi, dalam praktiknya banyak dari mereka yang

mengalami marginalisasi dalam proses distribusi bantuan.

"bantuan setelah konflik lewat NGO ada diberikan, berbentuk tender, bagian peternakan dibagi sapi satu per orang. Ada sekitar 500 orang Inong Balee di Kabupaten Bireuen. Kalau dalam bentuk modal usaha saat pembagian NDP merata, tetapi untuk seterusnya tidak merata lagi. Oleh badan usaha reintegrasi, seperti rumah, lewat dinas sosial, lewat citra karya." (Wawancara dengan Zuraida, 31 Mei 2025)

Keterbatasan akses yang dialami oleh kelompok *Inong Balee* tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor struktural yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat yang selama ini lebih berfokus pada mantan kombatan laki-laki. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih mudah dikenali dalam struktur militer maupun politik pasca konflik. Sebaliknya, perempuan eks kombatan kerap terabaikan karena tidak memiliki posisi yang terlihat secara formal dalam hierarki kombatan. Bias gender juga menjadi faktor penghambat lain, di mana peran perempuan selama konflik sering direduksi hanya sebagai pendukung, sehingga kontribusinya dianggap tidak cukup signifikan untuk mendapatkan bantuan ekonomi secara merata. Selain itu, lemahnya pendampingan serta pengawasan dalam pelaksanaan program turut membuka peluang terjadinya praktik diskriminatif dan ketidaktransparanan dalam proses seleksi maupun penyaluran bantuan.

"Untuk saat ini bantuan dari pemerintah; siapa yang legat lobi akan dapat, tapi kalau vakum, di situ saja tidak ada. Sekarang ini segala hal lewat pemerintah, lewat dinas sosial, itu juga menurut keadaan. Kalau tidak ada orang dalam, tidak bisa juga." (wawancara dengan Husniah, 27 Mei 2025)

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program reintegrasi ekonomi pasca konflik masih menghadapi tantangan mendasar, khususnya dalam menjangkau

kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti *Inong Balee*. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dan bantuan ekonomi tersebut berpotensi menghambat keberhasilan proses reintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berperspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi, agar seluruh pihak terdampak konflik termasuk perempuan eks kombatan mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses pembangunan pasca konflik di Aceh.

Proses reintegrasi pasca konflik menjanjikan dukungan ekonomi bagi para mantan kombatan, kenyataannya tidak semua eks anggota *Inong Balee* mampu merasakan manfaat tersebut secara merata. Pada fase awal perdamaian, sejumlah bantuan sempat disalurkan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Bantuan tersebut mencakup distribusi ternak, pemberian modal usaha, hingga pembangunan rumah bagi para mantan kombatan. Adanya bantuan tersebut sempat memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik, terutama bagi para perempuan yang telah meletakkan senjata dan berupaya membangun kembali kehidupan sipil mereka. Namun, alih-alih menjadi pijakan menuju kemandirian ekonomi, distribusinya hanya berlangsung sesaat dan tidak disertai dengan kerangka kebijakan yang konsisten, berkeadilan, serta berkelanjutan, sementara dalam praktiknya, berbagai hambatan administratif seperti keharusan memiliki badan hukum, pengajuan proposal resmi, dan keterhubungan dengan jaringan tertentu justru menjadi penghalang bagi sebagian besar mantan kombatan perempuan untuk mengakses program bantuan secara merata.

Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jurang yang cukup lebar antara idealisasi proses reintegrasi dan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Mereka mengalami kesulitan menjangkau program-program pemberdayaan ekonomi yang telah dijanjikan sejak awal proses perdamaian. Bukannya menjadi sarana rekonsiliasi dan pemulihan

sosial ekonomi, program reintegrasi justru menyisakan persoalan baru berupa marginalisasi terselubung terhadap perempuan mantan kombatan. Sebagian besar dari mereka tidak memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya karena secara administratif dianggap belum siap atau tidak memenuhi kriteria formal. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pendekatan reintegrasi yang kurang inklusif dan tidak sensitif terhadap kompleksitas sosial kelompok rentan, sehingga berisiko memperdalam ketimpangan dalam struktur sosial pasca konflik.

Realitas Ekonomi yang Masih Sulit

Pasca berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, kelompok perempuan eks kombatan yang tergabung dalam *Inong Balee* di Kabupaten Bireuen menghadapi tantangan ekonomi yang cukup kompleks. Berdasarkan temuan lapangan, tidak banyak perubahan signifikan yang mereka rasakan dalam aspek kesejahteraan ekonomi. Mayoritas dari mereka masih bergantung pada aktivitas ekonomi tradisional seperti bertani, berkebun, atau mengandalkan pekerjaan informal, seperti mencari hasil alam di pegunungan. Aktivitas ini bukanlah hasil dari proses pelatihan atau program pemberdayaan ekonomi yang terencana, melainkan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan, akibat tidak tersedianya alternatif penghidupan yang layak.

Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang dijanjikan dalam proses reintegrasi cenderung bersifat simbolis dan jangka pendek. Meskipun beberapa anggota kelompok sempat menerima pelatihan atau bantuan alat usaha, pelaksanaannya tidak merata dan tidak menyentuh seluruh kebutuhan dasar kelompok sasaran. Selain itu, program-program tersebut tidak diikuti oleh proses pendampingan, evaluasi, ataupun pengawasan secara berkelanjutan. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Minimnya tindak lanjut dan ketidakhadiran mekanisme kontrol

memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan belum mempertimbangkan kompleksitas kebutuhan perempuan eks kombatan secara holistik.

Akses terhadap permodalan juga menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh kelompok ini. Tidak tersedia skema pembiayaan mikro yang dirancang khusus untuk perempuan eks kombatan, sementara prosedur administratif untuk mengakses bantuan ekonomi formal umumnya tidak dipahami oleh mereka, karena tidak pernah mendapat sosialisasi maupun pendampingan yang memadai. Banyak dari mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan, tanpa perlindungan sosial yang memadai dari negara atau lembaga terkait. Dalam banyak kasus, beban ekonomi menjadi semakin berat karena mereka juga harus menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.

Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya perspektif gender dalam desain dan implementasi program reintegrasi pasca konflik. Perempuan yang pernah terlibat dalam perjuangan bersenjata tidak hanya menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri kembali ke kehidupan sipil, tetapi juga harus berhadapan dengan realitas sosial yang membatasi peran mereka sebagai pencari nafkah. Peran mereka selama masa konflik kerap kali tidak diakui secara formal, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai bagian dari kelompok eks kombatan. Dalam proses verifikasi penerima program reintegrasi, banyak dari mereka tidak terdata secara resmi karena dianggap hanya berperan sebagai pendukung atau pelaksana logistik, bukan sebagai pejuang aktif.

Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan reintegrasi belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi pasca konflik, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan eks kombatan. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan akan terus mengalami stagnasi.

Kelompok *Inong Balee*, yang sebelumnya turut berjuang demi perdamaian, kini harus menjalani kehidupan yang penuh keterbatasan, bahkan dalam situasi damai yang turut mereka perjuangkan. Kekecewaan yang mereka alami tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga karena rasa keterpinggiran dan pengabaian atas kontribusi yang telah mereka berikan.

Sebagian besar perempuan eks kombatan dari kelompok *Inong Balee* di Kabupaten Bireuen masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan pekerjaan informal lainnya. Pilihan ini bukan sepenuhnya hasil dari proses pemberdayaan yang sistematis, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas keterbatasan ekonomi pasca konflik. Sementara sebagian kecil dari mereka berhasil melanjutkan pendidikan tinggi, ketimpangan kesejahteraan tetap mencolok, terutama antara mereka yang memiliki akses terhadap jaringan sosial dan birokrasi dengan yang tidak. Ketimpangan ini diperparah oleh sistem birokrasi yang cenderung berbelit dan eksklusif, sehingga berbagai bentuk bantuan dari pemerintah maupun lembaga donor kerap kali gagal menjangkau kelompok-kelompok yang paling membutuhkan.

Akses terhadap bantuan dan peluang ekonomi juga sangat ditentukan oleh kedekatan individu dengan elit politik atau pejabat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan cenderung bersifat elitis dan tidak inklusif, memperkuat ketimpangan internal antar sesama mantan kombatan. Di sisi lain, perempuan eks kombatan juga menghadapi beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Mereka tidak hanya menjadi pencari nafkah utama, tetapi juga harus menjalankan fungsi domestik tanpa dukungan perlindungan sosial yang memadai dari negara. Banyak di antara mereka yang harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga, terutama setelah kehilangan pasangan karena konflik atau karena ditinggalkan. Fakta ini menunjukkan bahwa perdamaian yang terwujud tidak serta merta membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial

dan ekonomi mereka. Ketika ditanya mengenai kelanjutan pendidikan pasca konflik, salah satu informan, Bu Asma, menyatakan:

"Saya bisa lanjut kuliah karena ada dukungan. Tapi teman-teman lain banyak yang tidak sanggup, bukan karena malas tapi karena keadaan." (Wawancara dengan Asma, 25 Mei 2025).

Pernyataan ini mencerminkan bahwa akses terhadap peningkatan kapasitas sangat ditentukan oleh kondisi sosial-ekonomi dan dukungan struktural, bukan semata-mata oleh kemauan individu. Ketimpangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika program-program reintegrasi gagal menjangkau kelompok yang paling rentan.

Realitas yang dihadapi oleh kelompok *Inong Balee* mencerminkan kegagalan struktural dalam desain dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca konflik. Ketika proses pembangunan tidak dilandasi oleh prinsip keadilan distributif dan perspektif gender yang inklusif, maka perempuan eks kombatan akan terus mengalami peminggiran. Mereka yang dahulu ikut mengangkat senjata demi memperjuangkan martabat Aceh, kini harus menjalani hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan sosial, di tengah damai yang justru mereka bantu wujudkan. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen politik dan kebijakan afirmatif yang nyata agar kelompok ini tidak sekadar dikenang dalam sejarah perjuangan, tetapi juga dihargai dalam proses pemulihan yang berkeadilan.

Harapan Akan Masa Depan Yang Lebih Inklusif

Fase pasca konflik di Aceh menjadi momentum penting dalam merancang kembali struktur sosial yang lebih adil, berkelanjutan, dan setara bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak sekadar menandai berakhirnya kekerasan bersenjata, periode ini juga membuka peluang untuk merombak kembali relasi sosial yang selama ini didominasi oleh ketimpangan, terutama dalam konteks relasi gender. Bagi perempuan eks kombatan *Inong Balee*, masa depan yang inklusif bukan hanya dimaknai sebagai pemulihan ekonomi atau

pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai proses transformatif yang mencakup pengakuan atas peran mereka dalam perjuangan bersenjata, redistribusi sumber daya secara adil, dan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan yang sebelumnya menempatkan laki-laki sebagai pusat pembangunan perlu direvisi melalui pendekatan yang memberi ruang setara bagi perempuan sebagai aktor perubahan. Harapan akan keadilan gender yang muncul dalam masa damai mencerminkan kebutuhan mendasar untuk melibatkan perempuan sebagai subjek sejarah yang memiliki hak suara dalam menentukan arah pembangunan Aceh di masa depan.

Informan bernama Muslimah menyampaikan bahwa ada rasa kuat di kalangan perempuan yang pernah terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata, mereka cenderung diabaikan dalam tahapan rekonstruksi perdamaian. "Kami tidak ingin dilupakan. Kami juga ikut dalam berjuang. Tapi setelah damai, seolah semua hanya tentang mereka (laki-laki)," ujarnya dengan nada penuh kekecewaan. Ungkapan tersebut bukan sekadar ekspresi pengalaman pribadi, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif mengenai ketimpangan yang tertanam dalam kebijakan pasca konflik. Dalam pelaksanaannya, program reintegrasi di Aceh tampak berpihak secara tidak proporsional kepada mantan kombatan laki-laki, yang lebih banyak menerima dukungan seperti bantuan ekonomi, pelatihan kerja, serta akses ke posisi strategis di tingkat lokal. Sebaliknya, perempuan eks kombatan, seperti anggota *Inong Balee*, justru mengalami bentuk peminggiran ganda mereka tidak hanya dibatasi dalam hal akses ke program pemberdayaan, tetapi juga disisihkan dari narasi resmi tentang aktor-aktor utama dalam proses perdamaian. Situasi ini mencerminkan bahwa sistem sosial yang patriarkal masih berpengaruh secara struktural, menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan pembangunan, sementara perempuan secara halus didorong untuk kembali ke peran domestik yang kurang diperhitungkan dalam

pengambilan kebijakan.

Para mantan anggota *Inong Balee* menghadapi ketimpangan dalam akses bantuan dan pengakuan pasca konflik, namun mereka tetap menunjukkan keteguhan dan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan. Tanpa sokongan berarti dari negara atau lembaga donor, mereka memilih untuk tetap hadir dan aktif di tengah masyarakat. Seperti disampaikan Ajirna, "Kalau kami hanya diam, kami benar-benar akan hilang. Jadi, walau susah, kami harus tetap berbuat, tetap bekerja, tetap ada." Sikap ini merefleksikan upaya sadar untuk menolak kondisi marginalisasi. Partisipasi mereka juga menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi narasi patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pusat perubahan. Muslimah menyampaikan, "*Kami tidak ingin dilupakan. Kami juga ikut dalam berjuang. Tapi setelah damai, seolah semua hanya tentang mereka (laki-laki).*" Ucapan tersebut menegaskan adanya kesadaran kritis terhadap ketimpangan representasi gender serta harapan kolektif akan pengakuan setara dalam sejarah perjuangan dan proses perdamaian di Aceh.

Aspirasi terhadap masa depan yang lebih inklusif berangkat dari harapan untuk menciptakan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun politik. Para eks anggota *Inong Balee* tidak hanya menginginkan kesetaraan secara normatif, seperti keterjangkauan terhadap program bantuan atau peluang kerja, tetapi juga memperjuangkan keadilan substantif dalam hal pengakuan atas peran mereka serta keterlibatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Harapan mereka melampaui simbolisme kesetaraan; mereka menuntut perubahan sistemik yang memungkinkan perempuan dan laki-laki berada dalam posisi yang sejajar dalam proses pembangunan dan penataan masa depan.

Menurut perspektif *feminist post-conflict theory*, perdamaian yang sejati tidak sekadar ditandai oleh berhentinya kekerasan bersenjata, melainkan tercapainya keadilan sosial secara menyeluruh termasuk

pemerataan distribusi sumber daya, keterwakilan yang adil, serta pengakuan terhadap pengalaman unik perempuan yang kerap terpinggirkan dalam situasi konflik. Pendekatan ini menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses rekonstruksi harus menjadi prioritas, sebab pengalaman mereka selama konflik memiliki karakteristik tersendiri yang sering kali tidak tertangkap dalam mekanisme reintegrasi yang berorientasi maskulin.

Bagi para eks kombatan perempuan seperti *Inong Balee*, identitas mereka membawa beban ganda: dahulu mereka adalah bagian dari barisan perjuangan, namun dalam masa damai justru terperangkap kembali dalam struktur patriarkal yang membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu, cita-cita akan masa depan yang inklusif bagi kelompok ini tidak cukup diwujudkan melalui bantuan ekonomi semata, tetapi harus mencakup keadilan dalam aspek historis, sosial, dan simbolik yang dijamin oleh negara. Hal ini ditegaskan oleh Zuraida, salah satu mantan anggota *Inong Balee*, yang menyampaikan: "Kami tidak ingin hanya dikenang sebagai bagian dari masa lalu. Kami ingin dilihat sebagai bagian dari masa depan Aceh." Ucapan tersebut mencerminkan desakan akan rekonsiliasi yang lebih mendalam, yaitu dengan mendistribusikan kembali kekuasaan secara adil dan membongkar ketimpangan gender yang selama ini melekat dalam struktur sosial.

Dengan demikian, pembangunan pasca konflik yang adil dan setara tidak dapat semata-mata dibebankan kepada negara atau lembaga internasional. Diperlukan kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk membangun ruang-ruang partisipasi inklusif. Perempuan yang pernah menjadi kombatan tidak menginginkan belas kasihan, melainkan pengakuan atas peran dan kontribusi nyata mereka. Masa depan yang inklusif akan terwujud jika suara mereka benar-benar diberi ruang dalam setiap tahap pengambilan kebijakan pembangunan yang menentukan masa depan Aceh.

Kesimpulan

Kehidupan perempuan mantan kombatan *Inong Balee* pasca konflik di Kabupaten Bireuen ditandai oleh perubahan identitas dan peran sosial yang berlangsung secara kompleks dan tidak selalu mulus. Dari peran mereka sebagai bagian integral dalam kekuatan militer Gerakan Aceh Merdeka, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan sipil yang kembali dikonstruksi oleh norma gender tradisional. Proses transisi ini tidak ditopang oleh sistem reintegrasi yang memadai, sehingga perubahan identitas yang dialami kerap tidak mendapatkan pengakuan resmi dari negara maupun masyarakat.

Peran signifikan *Inong Balee* dalam masa konflik baik dalam bidang logistik, intelijen, hingga operasi militer tidak mendapat tempat yang proporsional dalam periode damai. Narasi perdamaian yang cenderung berpusat pada laki-laki membuat kontribusi mereka terhapus dalam ruang-ruang simbolik maupun kebijakan. Ketidakhadiran mereka dalam proses perumusan kebijakan pasca konflik mencerminkan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan belum menyentuh aspek keadilan gender secara utuh.

Minimnya partisipasi perempuan eks kombatan dalam struktur pemerintahan lokal menjadi indikator bahwa proses reintegrasi tidak dirancang secara inklusif. Hambatan struktural seperti tidak adanya kebijakan afirmatif, rendahnya akses pendidikan formal, serta dominasi budaya patriarkal menyebabkan posisi strategis dalam pemerintahan sulit dijangkau oleh mereka. Padahal, kehadiran mereka dalam ranah politik sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem sosial yang demokratis dan setara.

Di bidang ekonomi, temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses bantuan. Kendala administratif yang kompleks, minimnya pendampingan teknis, serta lemahnya jejaring sosial-politik menjadikan perempuan eks kombatan kurang terfasilitasi secara adil. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan reintegrasi yang tidak peka terhadap realitas dan kebutuhan spesifik yang dihadapi

oleh perempuan.

Kondisi ekonomi yang masih penuh keterbatasan semakin memperjelas lemahnya daya jangkau program pemulihan terhadap kelompok rentan seperti *Inong Balee*. Dalam situasi damai sekalipun, mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar, karena negara belum mampu menjamin kesejahteraan secara merata. Ketidadaan pendekatan yang inklusif dan responsif gender membuat proses reintegrasi kehilangan fungsinya sebagai jalan menuju keadilan sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural, para perempuan eks kombatan tetap menunjukkan semangat untuk berperan dalam pembangunan. Harapan mereka melampaui tuntutan kesetaraan formal dan bergerak menuju pengakuan atas kontribusi, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta distribusi kekuasaan yang adil. Dalam perspektif teori feminis pasca konflik, perdamaian yang sejati tidak hanya berarti berhentinya kekerasan, tetapi juga mencakup kehadiran perempuan sebagai pelaku utama dalam proses rekonstruksi. Karena itu, pembangunan pasca konflik yang benar-benar berkeadilan membutuhkan keterlibatan negara dan kesadaran kolektif untuk mengatasi ketimpangan gender yang telah mengakar secara historis.

Referensi

- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67-92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Dwiyanto, D. (2021). Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian. 0, 1-7.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue April). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Jayanti, K. (2018). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 49-70.
- Masrizal, M., Saputra, A., Liyana, C. I., & Nurkhalis, N. (2020). Inong Balee dan Balee Inong; Kiprah Gerakan Perempuan Aceh di Era Transisi Demokrasi. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 192.
- Mutiah Nabilla Ulfah, Muhammad Fedryansyah, dan S. A. N. (2022). Analisis Teori Kekerasan Johan Galtung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume*, 4.
- Nurzahra, A. T., Sumantri, S. H., Hanita, M., Damai, P., Resolusi, D. A. N., & Nasional, F. K. (2021). Peran Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Pascakonflik Aceh (Studi Kasus Liga Inong Aceh Pada Reintegrasi Inong Balee Pascakonflik Di Aceh Tahun 2005). *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 7(October 2020), 206-231.
- Rasyidah, dkk. (2019). Maskulinitas di Masyarakat Aceh Pascakonflik dan Pengaruhnya terhadap perilaku Kekerasan terhadap Perempuan. Banda Aceh: Ibnunourhas Publishing bekerja sama dengan PSW UIN Ar-Raniry, UN Women, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh.
- Rizal, M. (2022). Inong Balee Dalam Gerakan Aceh Merdeka (1976 - 2005). Skripsi 16(1), 1-23.
- Rolls, S. B., & Evans, A. (2020). Feminist Peace and Security in the Pacific Islands. <https://doi.org/10.21201/2020.6485>
- Sugiyono. (2020). Metodologi Kajian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Susanti, F. (2016). Pasukan Inong Balee Dalam Sejarah Aceh. *Jurnal Haba* No.77/2015, 1-23.
- Wienclaw, R. A. (2021). No Title. *Teori Fungsionalis Struktural Tentang Gender*. https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/structural-functionalist-theories-gender?utm_source=chatgpt.com
- Wawancara:
- Wawancara dengan Maryamah, 17 Mei 2025.
- Wawancara dengan Muslimah, 20 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ajirna, 23 Mei 2025.
- Wawancara dengan Mutiani, 25 Mei 2025.
- Wawancara dengan, Asma 25 Mei 2025.
- Wawancara dengan, Husniah 27 Mei 2025.
- Wawancara dengan Zuraida, 31 Mei 2025